



## Subsidi Dalam Penguatan Kebijakan Fiskal Pro Kemiskinan

### POIN-POIN PENTING:

1. Kesalahan dalam penentuan skema subsidi dalam kebijakan fiskal memperlambat proses strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
2. Beban bunga hutang terutama beban bunga obligasi rekap dari program BLBI menjadi beban yang ditanggung oleh masyarakat miskin
3. Perlu kebijakan subsidi yang memperkuat kerangka kebijakan fiskal yang pro kemiskinan

Subsidi merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah dalam rangka menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan pembangunan<sup>i</sup>. Fungsi subsidi adalah melakukan koreksi terhadap ketidaksempurnaan pasar atau *market imperfections*<sup>ii</sup>. Di Indonesia kebijakan subsidi merupakan instrumen penting dalam mengelola pembangunan. Tujuan utama dalam kebijakan subsidi di Indonesia adalah menjaga kelompok masyarakat miskin agar tetap akses terhadap pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan sosial.

Tapi pada prakteknya, kebijakan subsidi di Indonesia justru keluar dari konteks perlindungan terhadap kelompok masyarakat miskin. Walaupun setiap tahun terjadi kenaikan anggaran subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tapi anggaran tersebut justru sebagian besar dinikmati oleh kelompok menengah keatas seperti kasus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan beban bunga hutang terutama bunga obligasi rekap dari program Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ini sangat ironis, ketika beban subsidi dalam APBN semakin besar dan menggerogoti APBN justru manfaatnya jatuh pada kelompok menengah atas. Terjadi disorientasi dalam kebijakan subsidi di Indonesia.

### SUBSIDI DALAM KERANGKA ILMU EKONOMI

Subsidi merupakan salah satu instrumen kebijakan oleh negara untuk mengoreksi ketidaksempurnaan pasar atau *market imperfections*. Dia dapat menstimulus produksi dan sekaligus juga menjamin terwujudnya proses konsumsi. Sehingga subsidi diharapkan dapat memainkan peran untuk menutupi ketidaksempurnaan pasar<sup>iii</sup>.

Kenapa subsidi penting? Ada masyarakat yang dirugikan dalam proses pembangunan. Petani, keluarga miskin dan orang tua jompo adalah kelompok yang sering masuk ke dalam daftar bidik dari kebijakan subsidi. Hal ini tidaklah mengherankan, mengingat negara sebagai regulator juga berharap melalui rangkaian kebijakan dapat menghasilkan kesejahteraan masyarakatnya.

Tidak ada negara yang tidak menggunakan subsidi. Bahkan negara yang bergabung dalam *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* seperti Inggris dan Amerika Serikat juga menjadikan instrumen subsidi dalam pembangunan ekonomi. Kita lihat bagaimana subsidi kepada petani merupakan instrumen yang sangat penting diambil oleh negara OECD. Dia tidak saja dimaksudkan untuk memenuhi produksi dalam negeri, namun adalah untuk memperluas pangsa pasar internasional. Selain itu, program jaminan sosial yang dilakukan di negara-negara OECD juga menunjukkan bagaimana negara maju sangat konsen terhadap kebijakan subsidi dalam rangka memberikan pelayanan terhadap warga negara<sup>iv</sup>.

Kerangka dasar kebijakan subsidi dalam ilmu ekonomi sebenarnya berasal dari sifat dan karakteristik suatu barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi publik, kita mengenal tiga jenis barang atau jasa yaitu barang publik (*public goods*), barang campuran (*quasi/mixed goods*) dan barang private (*private goods*). *Public goods* adalah jenis barang yang semua masyarakat dapat memanfaatkannya tanpa adanya persaingan (*non rival*) seperti pelayanan pendidikan dasar. *Public goods* dalam prakteknya diperlukan peranan negara dalam mendistribusikan kepada masyarakat. Negara wajib melakukan intervensi agar semua lapisan masyarakat dapat mengakses dengan sempurna. *Quasi/mixed goods*, barang atau jasa ini merupakan campuran antara *public goods* dengan *private goods* seperti pendidikan menengah atau tinggi.

Sifat *quasi/mixed goods* adalah ada sebagian dari masyarakat yang perlu intervensi negara dalam menyediakan akses terhadap barang atau jasa tersebut. Dan ada juga sebagian masyarakat yang perlu persaingan (*rival*) dalam mengakses barang atau jasa tersebut. *Private goods* adalah jenis barang atau jasa yang memerlukan persaingan murni (*pure rival*) dalam mengakses atau mengkonsumsi barang tersebut seperti pelayanan kesehatan kelas eksklusif atau barang dan jasa yang bersifat tersier<sup>v</sup>.

Kebijakan subsidi harus diarahkan untuk dua jenis barang atau jasa yaitu *public goods* dan *quasi/mixed goods*. Dalam *public goods*, negara sepenuhnya memberikan jaminan kepada warga negara tanpa kecuali untuk mendapatkan akses yang luas terhadap barang atau jasa tersebut. Sedangkan dalam *quasi/mixed goods*, intervensi negara sedikit berkurang. Negara hanya memberikan pelayanan terhadap kelompok yang memang tidak mampu secara sempurna mendapatkan akses terhadap barang atau jasa tersebut<sup>vi</sup>.

Selanjutnya, dalam ilmu ekonomi kita mengenal *eksternalitas*. *Eksternalitas* adalah efek yang ditimbulkan dalam proses pembangunan terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Efeknya bisa positif atau negatif. *Eksternalitas positif* seperti pendidikan dan kesehatan. Ketika pelayanan pendidikan dan kesehatan diberikan negara sangat baik tentu akan meningkatkan kualitas warga negara dan ini dapat mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan *eksternalitas negatif* seperti pembangunan industri yang menyebabkan polusi lingkungan sehingga berdampak pada kesehatan masyarakat. Dalam model ini harus ada kompensasi/subsidi yang diberikan kepada masyarakat yang menerima dampak<sup>vii</sup>.

Selanjutnya, dalam ilmu ekonomi kita mengenal *eksternalitas*. *Eksternalitas* adalah efek yang ditimbulkan dalam proses pembangunan terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Efeknya bisa positif atau negatif. *Eksternalitas positif* seperti pendidikan dan kesehatan. Ketika pelayanan pendidikan dan kesehatan diberikan negara sangat baik tentu akan meningkatkan kualitas warga negara dan ini dapat mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan *eksternalitas negatif* seperti pembangunan industri yang menyebabkan polusi lingkungan sehingga berdampak pada kesehatan masyarakat. Dalam model ini harus ada kompensasi/subsidi yang diberikan kepada masyarakat yang menerima dampak<sup>viii</sup>.

Ada dua model pembiayaan subsidi dalam konteks kebijakan fiskal. Pertama, subsidi langsung. Model subsidi langsung adalah program subsidi langsung diterima oleh target group dari program subsidi seperti subsidi beras untuk masyarakat miskin (Raskin) yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kedua subsidi tidak langsung. Program subsidi yang dilaksanakan untuk intervensi terhadap pasar (*market intervention*), biasanya berupa subsidi terhadap harga seperti kebijakan subsidi BBM. Subsidi tidak langsung bisa juga dilakukan negara dalam rangka memberikan insentif terhadap input produksi seperti subsidi pupuk.

## SKEMA KEBIJAKAN SUBSIDI DI INDONESIA

Di Indonesia kebijakan subsidi sudah merupakan bagian utama dari kebijakan fiskal. Setiap tahun pemerintah mengalokasikan anggaran negara untuk program-program subsidi. Ada dua pendekatan dalam menyusun kebijakan subsidi dalam ruang fiskal di Indonesia. Pertama, pemerintah meletakkan anggaran subsidi dalam satu blok anggaran khusus untuk subsidi. Di dalam blok anggaran tersebut terdapat dua item yaitu anggaran subsidi energi dan subsidi non energi. Selanjutnya program subsidi diletakkan dalam program kebijakan pembangunan di kementerian dan kelembagaan di pemerintahan dan pemerintah daerah melalui APBD seperti anggaran kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan lainnya.

Khusus untuk subsidi energi dan non energi, sejak tahun 2007 sampai 2013 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2007, pemerintah menganggarkan pengeluaran subsidi sebesar Rp. 150 triliun rupiah. Dalam APBN 2013, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi sebesar Rp. 317 triliun atau naik dua kali lipat dibandingkan tahun 2007. Bila dilihat dari alokasi dalam APBN, alokasi subsidi telah mencapai 19-20% dari total APBN. Dalam segi alokasi subsidi, sekitar 80% dialokasikan untuk subsidi energi seperti subsidi BBM dan subsidi listrik.

Ada dua hal yang menarik dicermati dalam kerangka kebijakan fiskal dalam melihat skema subsidi di Indonesia. Pertama, perlu apresiasi terhadap kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberi ruang yang besar bagi subsidi. Artinya, pemerintah sangat konsen terhadap pemerataan aspek pembangunan karena fungsi utama subsidi adalah pemerataan. Kedua, bila kebijakan subsidi tidak hati-hati dilakukan, dimana fungsi dan peranan subsidi bagi pemerataan pembangunan tidak tercapai sedangkan alokasinya semakin membesar maka ini akan menjadi dilema dalam kebijakan fiskal. Subsidi akan menjadi beban bagi kebijakan fiskal.

Pertanyaan, apakah kebijakan subsidi yang dilakukan pemerintah sudah efektif sesuai dengan fungsi dan tujuan utama subsidi atau justru menjadi beban dalam kebijakan fiskal? Titik perhatian kita arahkan pada subsidi energi karena kontribusinya sangat besar dalam anggaran terutama subsidi BBM. Bila dilihat dari definisi barang publik, BBM tidaklah *pure public goods* tapi lebih mengarah pada *quasi/mixed goods* karena ada variasi masyarakat dalam pola konsumsi. Bagi pelayanan publik seperti angkutan umum, terutama *mass transportation* atau angkutan umum massal, pemberlakuan BBM sebagai *public goods* dapat diterima. Tapi ketika itu di konsumsi oleh kendaraan pribadi terutama mobil mewah maka BBM bukan lagi *public goods* tapi sudah menjadi *private goods*.

**Tabel 1.**  
**Anggaran Subsidi di Indonesia, Tahun 2007-2013 (Rp. Milliar)**

JENIS SUBSIDI	TAHUN						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>ENERGI</b>							
Subsidi BBM	83.792,3	139.106,7	45.039,4	82.351,3	165.161,3	137.379,8	193.805,2
Subsidi Listrik	33.073,5	83.906,5	49.546,5	57.601,6	90.447,5	64.793,4	80.937,8
<b>TOTAL SUBSIDI ENERGI</b>	<b>116.865,9</b>	<b>223.013,2</b>	<b>94.585,9</b>	<b>139.952,9</b>	<b>255.608,8</b>	<b>202.333,2</b>	<b>274.743,0</b>
<b>NON ENERGI</b>							
Subsidi Pangan	6.584,3	12.095,9	12.987,0	15.153,8	16.539,3	20.926,3	17.197,9
Subsidi Pupuk	6.260,5	15.181,5	18.329,0	18.410,9	16.344,6	13.958,6	16.228,8
Subsidi Benih	479,0	985,2	1.597,2	2.177,5	96,9	129,5	1.454,2
PSO	1.025,0	1.729,1	1.339,4	1.373,9	1.833,9	2.151,4	1.521,1
Kredit Program	347,5	939,3	1.070,0	823,0	1.522,9	1.293,9	1.248,5
Subsidi Minyak Goreng	24,6	103,3	-	-	-	-	-
Subsidi Pajak	17.113,6	21.018,2	8.173,6	14.815,1	3.411,8	4.263,4	4.825,1
Subsidi Kedelai	-	225,7	-	-	-	-	-
Subsidi Lainnya	1.514,0	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SUBSIDI NON ENERGI</b>	<b>33.348,6</b>	<b>52.278,2</b>	<b>43.496,3</b>	<b>52.754,1</b>	<b>39.749,4</b>	<b>42.723,1</b>	<b>42.475,6</b>
<b>TOTAL SUBSIDI</b>	<b>150.214,5</b>	<b>275.291,4</b>	<b>138.082,2</b>	<b>192.707,0</b>	<b>295.358,2</b>	<b>245.076,3</b>	<b>317.218,6</b>

Sumber: Departemen Keuangan Negara berbagai tahun

Kesalahan dalam pengelolaan kebijakan subsidi BBM menimbulkan akses terhadap kerawanan fiskal di Indonesia. Ketika harga BBM terus mengalami kenaikan dan pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup besar setiap tahun, otomatis anggaran subsidi BBM terus membesar dalam APBN.

Ketika APBN tidak mampu menyediakan akses pembiayaan maka sulit bagi pemerintah merancang program lain yang lebih efektif karena anggaran sudah serap oleh subsidi BBM seperti yang terjadi saat ini.

Penguatan basis subsidi terhadap non energi sebenarnya lebih efisien dalam rangka menempatkan peranan Negara sebagai pelayan public. Terutama meningkatkan kapasitas subsidi terhadap pangan, pupuk dan benih akan lebih efektif dalam upaya mendorong subsidi sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan. Sekitar 57,8% penduduk miskin di Indonesia berada di sektor pertanian. Meningkatkan kapasitas pertanian melalui subsidi pangan, pupuk dan benih akan membantu peningkatan kapasitas sektor pertanian terutama bagi petani kecil. Dan akan mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan menurunkan angka kemiskinan di sektor pertanian.

### **PARADOKS KEBIJAKAN FISKAL PRO KEMISKINAN**

Dalam kebijakan fiskal di Indonesia ada enam fungsi dari kebijakan fiskal yaitu fungsi otoritas, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi stabilisasi dan fungsi distribusi. Sebagai fungsi alokasi, kebijakan fiskal harus dialokasikan sesuai target pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang lebih baik. Sedangkan sebagai fungsi distribusi, kebijakan fiskal harus mampu menciptakan pemerataan pembangunan dalam masyarakat. Dimana filosofi dari kebijakan fiskal adalah *pro growth, pro poor, and pro sustainability*.

Instrumen dari dua fungsi kebijakan fiskal diatas adalah alokasi anggaran yang pro terhadap pertumbuhan, kemiskinan dan keberlanjutan serta subsidi sebagai alat pemerataan pembangunan dengan sasaran utama adalah kelompok miskin. Peningkatan sisi penerimaan Negara dalam APBN merupakan ruang fiskal (*fiskal space*) yang besar dalam mendorong fungsi fiskal sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan pemerataan. Tapi persoalannya justru ruang fiskal selalu menjadi problema dalam sistem alokasi terhadap pengeluaran pemerintah.

Ada beberapa permasalahan dalam kondisi fiskal saat ini terutama dari sisi pengeluaran. Pertama, ketidaksesuaian antara target program dengan alokasi anggaran. Kasus yang menarik adalah dalam kasus penanggulangan kemiskinan melalui program beras untuk masyarakat miskin (Raskin). Dibeberapa kasus terlihat jelas bahwa anggaran untuk Raskin justru kurang efektif untuk mencapai sasaran kerawanan pangan masyarakat miskin karena dalam beberapa kasus di kelompok miskin pertanian justru Raskin tidak dimanfaatkan. Kedua, persoalan efisiensi anggaran. Buruknya sistem perencanaan, tata kelola dan pengawasan dalam birokrasi pemerintah menyebabkan belanja Negara tidak efisiensi. Indikasinya terlihat semakin membesarnya dana SiLPA setiap tahun. Ketiga, besarnya beban bunga hutang dan subsidi energi yang menyebabkan ruang fiskal yang tidak sehat.

Khusus untuk poin nomor tiga, ini sangat menarik sekali dicermati dalam rangka mewujudkan kebijakan fiskal yang pro kemiskinan. Kasus ini merupakan paradox kebijakan fiskal yang selalu dikelola oleh pemerintah. Padahal efek dari kebijakan tersebut sangat besar terhadap pembangunan nasional. Kita perlu analisis kebijakan fiskal ini secara lebih mendalam agar memberikan pembelajaran dalam rangka menciptakan kebijakan fiskal pro kemiskinan.

Pada tabel 2, terlihat beban subsidi energi dan beban bunga hutang sangat jauh sekali besarnya dibanding anggaran untuk kemiskinan. Pada tahun 2005, total subsidi energi dan beban bunga hutang dalam APBN sebesar Rp. 169.5 triliun, bandingkan dengan total anggaran untuk kemiskinan yang hanya sebesar Rp. 28 triliun. Artinya, anggaran subsidi energi dan beban bunga hutang enam kali lebih besar dibandingkan anggaran kemiskinan. Pada tahun 2012, jumlah subsidi energi dan beban bunga hutang sebesar Rp. 325.3 triliun, naik dua kali lipat dibanding anggaran 2005. Sedangkan anggaran untuk kemiskinan hanya sebesar Rp. 99.2 triliun.

Artinya anggaran subsidi energi dan beban bunga hutang tiga kali lebih besar dibandingkan anggaran kemiskinan. Implikasi dari kebijakan tersebut terlihat dari rendahnya penurunan penduduk miskin setiap tahun di Indonesia. Padahal target utama kebijakan fiskal adalah menurunkan angka kemiskinan dan fungsi subsidi sebagai fungsi distribusi terhadap pemerataan aspek-aspek pembangunan. Inilah yang disebut paradox dalam kebijakan fiskal pro kemiskinan.

Persoalan beban bunga hutang dalam APBN merupakan persoalan yang lebih besar dibandingkan persoalan subsidi energi. Beban bunga hutang dalam APBN terus mengalami peningkatan yang signifikan. Bila tahun 2005, beban bunga hutang dalam APBN hanya sebesar Rp. 65.1 triliun sedangkan tahun 2012 naik menjadi Rp. 123 triliun. Membengkaknya beban bunga hutang disebabkan agresifnya pemerintah menambah hutang baik hutang luar negeri maupun hutang dalam negeri.

Ada beberapa aspek yang perlu dicermati dalam melihat kondisi tersebut. Pertama, kebijakan fiskal yang mengatur masalah deficit anggaran merupakan penyebab dari bertambahnya hutang Negara. Untuk menutup deficit anggaran, pemerintah cenderung untuk meningkatkan hutang. Ini perlu menjadi koreksi besar bagi pemerintah bahwa sistem kebijakan deficit perlu diperbaiki dengan skema anggaran berimbang seperti yang sudah lama diterapkan oleh Indonesia. Kedua, membuka kembali masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kenapa ini perlu diekspose kembali? Karena setengah dari beban bunga hutang merupakan efek dari kebijakan BLBI. Negara saat ini masih menanggung sebesar Rp. 60 triliun/tahun bunga dari obligasi rekap yang bersumber dari BLBI. Padahal BLBI yang merupakan kebijakan dalam rangka penyehatan perbankan dalam *Asian Financial Crisis* justru dimanfaatkan oleh para debitur-debitur perbankan memperkaya diri dan memperkuat basis bisnis mereka. Dan target dari BLBI tersebut hampir dikatakan gagal dan justru rakyat yang menanggung beban bunga hutang tersebut.

Tabel 2

**Anggaran Subsidi, Beban Bunga Hutang, Anggaran Kemiskinan dan Penduduk Miskin  
di Indonesia, Tahun 2005-2012**

TAHUN	SUBSIDIS (Rp. Triliun)			BEBAN BUNGA HUTANG (Rp. Triliun)	ANGGARAN KEMISKINAN (Rp. Triliun)	PENDUDUK MISKIN	PENAMBAHAN/ (PENGURANGAN) PENDUDUK MISKIN
	ENERGI	NON ENERGI	TOTAL				
2005	104.4	16.3	120.7	65.1	28.0	38,715,824	
2006	94.6	12.8	107.4	79.0	46.6	43,690,581	4,974,757
2007	116.8	33.3	150.1	79.8	53.1	38,959,204	(4,731,377)
2008	223.0	52.2	275.2	88.4	60.6	36,576,910	(2,382,294)
2009	94.5	43.4	137.9	93.7	80.1	34,118,553	(2,458,357)
2010	139.9	52.7	192.6	88.3	81.4	32,314,784	(1,803,769)
2011	255.6	39.7	295.3	106.5	93.8	30,701,625	(1,613,159)
2012	202.3	42.7	245.0	123.0	99.2	28,594,175	(2,107,450)

Sumber: APBN dan BPS (diolah berbagai tahun)

Sudah saatnya pemerintah harus berani untuk menekan para debitur-debitur program BLBI untuk membayar bunga obligasi rekap karena hamper sebagian besar perbankan yang mendapatkan dan BLBI sudah menjadi bank yang besar dengan keuntungan yang sangat besar. Mereka ini harus memenuhi kewajiban dalam membayar bunga obligasi rekap sehingga sebagian beban bunga hutang dalam APBN dapat dikurangi dan alokasinya bisa dimanfaatkan untuk subsidi masyarakat miskin.

Dari skema pengurangan beban subsidi energi dan beban bunga hutang, sebenarnya pemerintah memiliki kesempatan yang baik dalam mewujudkan kebijakan fiskal yang pro kemiskinan. Masih besar potensi APBN yang bisa dialokasikan untuk program-program penanggulangan kemiskinan andai saja pemerintah berani mengambil terobosan dalam memperbaiki subsidi energi dan beban bunga hutang.

Penguatan instrumen subsidi dalam rangka fungsi distribusi terhadap pemerataan pembangunan merupakan hal yang tidak mustahil untuk dilakukan. Dengan efisiensi pada subsidi energi dan menurunkan beban APBN terhadap beban bunga hutang akan ada ratusan triliun rupiah anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk program-program pengentasan kemiskinan. Dan pada akhirnya, pemerintah haruslah merancang sebuah kebijakan fiskal yang pro terhadap kemiskinan.

## REKOMENDASI

Dalam konteks memperbaiki kebijakan subsidi dan rangka memperkuat kebijakan fiskal yang pro kemiskinan, maka diperlukan beberapa kebijakan sebagai berikut:

### A. Pemerintah perlu membuat Road Map terhadap kebijakan subsidi agar sesuai dengan target dan tujuan dari pemerataan akses masyarakat terhadap pembangunan.

Tujuan dari Road Map ini menjadi kerangka bagi kebijakan subsidi dan kebijakan fiskal untuk masa yang akan datang. Program subsidi memang harus sesuai dengan filosofi dari kebijakan ekonomi publik. Dimana tujuan utamanya adalah menyediakan akses terhadap *public goods* bagi semua lapisan masyarakat tanpa ada kecuali (inklusif) karena itulah wujud tanggung jawab negara dalam mengelola kehidupan warga negara. Setelah itu dapat diselesaikan Negara harus masuk ke subsidi lini kedua yaitu memberikan subsidi terhadap *quasi/mixed goods* bagi masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu mengakses barang atau jasa tersebut. Ini penting agar ketimpangan dapat diatasi.

## B. Peningkatan Kapasitas Subsidi untuk Pangan, Pupuk dan Benih

Sekitar 57,8% penduduk miskin berada di sektor pertanian. Kondisi sangat kronis karena tekanan dalam sistem transformasi ekonomi dan perkembangan pembangunan yang mengabaikan sektor pertanian. Subsidi harus bisa menjadi instrumen untuk mengatasi persoalan kemiskinan di sektor pertanian ini. Salah satu kebijakan mendorong perbaikan dari aspek input produksi seperti pupuk dan benih. Pemerintah harus memberikan peningkatan kapasitas terhadap program subsidi pupuk dan benih. Subsidi pangan harus berorientasi pada sistem ketahanan pangan masyarakat miskin.

## C. Pengendalian Hutang Negara dan Subsidi Energi

Poin utama adalah penyelesaian kasus BLBI dan bagaimana beban bunga obligasi rekap bukan lagi menjadi domain APBN. Sudah seharusnya beban bunga obligasi rekap dialihkan kepada bank yang memanfaatkan dana BLBI. Selama ini rakyatlah yang menanggung bunga tersebut. Sungguh suatu ketidakadilan secara massif yang dilakukan oleh pemerintah disaat rakyat terjat dalam kemiskinan justru mereka menanggung beban pembayaran bunga obligasi rekap yang dimanfaatkan oleh orang kaya. Pemerintah juga harus mengendalikan hutang agar tidak menjadi beban jangka panjang. Sebenarnya skema deficit dalam APBN tidaklah sehat dalam kerangka fiskal bila deficit ditutupi dengan hutang. Selanjutnya pemerintah secepat mungkin menyelesaikan polemic berkepanjang terhadap pengendalian subsidi energi.

Policy brief ini ditulis oleh **Setyo Budiantoro, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa** dan **Wiko Saputra, Economic Policy Officer Perkumpulan Prakarsa**.

**Kantor Prakarsa:** Jl. Rawa Bambu 1 Blok A No.8E Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520. Telpun (021)7811798.

## Endnotes

<sup>1</sup> Buckley, Neil, Mestelman, Stewar & Mohamed Shehata. 2003. Subsidizing Public Input. *Journal of Public Economics* 87 (2003) 819–846.

Bowles, S & Sung-Ha Hwang (2008). *Social Preferences and Public Economics: Mechanism Design when Social Preferences Depend on Incentives*. *Journal of Public Economics* 92(2008) 1811-1820.

<sup>1</sup> Davis, J.S., Quirnbach, H.C., Swenson, C.W., 1995. *Income Tax Subsidies and Research and Development Spending in a Competitive Economy: an Experimental Study*. *The Journal of the American Taxation Association* 17 (Supplement), 1–26.

<sup>1</sup> Martinez, C., Javier. 2006. *Public Capital and Imperfect Competition*. *Journal of Public Economics* 90 (2006) 349–378.

<sup>1</sup> Kneller, Bleaney, Michael F. & Norman Gemmell. 1999. *Fiscal Policy and Growth: Evidence from OECD Countries*. *Journal of Public Economics* 74 (1999) 171–190. Hamilton, F., Stephen, Sunding, L., Sunding & David Zilberman. 2003. *Public goods and the value of product quality regulations: the case of food safety*. *Journal of Public Economics* 87 (2003) 799–817.

<sup>1</sup> Cremer, Helmuth & Jean-Jacques Laffont. 2003. *Public goods with costly access*. *Journal of Public Economics* 87 (2003) 1985–201. Caplan, J., Arthur, Cornes C., Richard & Emilson C.D. Silva. 2000. *Pure public goods and income redistribution in a federation with decentralized leadership and imperfect labor mobility*. *Journal of Public Economics* 77 (2000) 265–284. Anderson, P., Simon, Goeree K., Jacob & Charles A. Holt. 1998. *A theoretical analysis of altruism and decision error in public goods games*. *Journal of Public Economics* 70 (1998) 297–323. Blomqvist, A & P-O. Johansson. 1997. *Economic efficiency and mixed public/private insurance*. *Journal of Public Economics* 66 (1997) 505–516.

<sup>1</sup> Bucovetsky, S. 2005. *Public input competition*. *Journal of Public Economics* 89 (2005) 1763–1787. Dijk, V Frans, , Sonnemans Joep & Frans van Winden. 2002. *Social ties in a public good experiment*. *Journal of Public Economics* 85 (2002) 275–299. Goeree, K., Jacob, Holt, A., Charles & Susan K. Laury. 2002. *Private costs and public benefits: unraveling the effects of altruism and noisy behaviour*. *Journal of Public Economics* 83 (2002) 255–276.

<sup>1</sup> Ellingsen, Tore. 1998. *Externalities vs internalities: a model of political integration*. *Journal of Public Economics* 68 (1998) 251–268. Cornes, R., Sandler, T., 1996. *The Theory of Externalities, Public Goods, and Club Goods*, 2nd ed. Cambridge University Press, Cambridge. Fershtman, Chaim & Yoram Weiss. 1998. *Social rewards, externalities and stable preferences*. *Journal of Public Economics* 70 (1998) 53–73.

<sup>1</sup> Ellingsen, Tore. 1998. *Externalities vs internalities: a model of political integration*. *Journal of Public Economics* 68 (1998) 251–268. Cornes, R., Sandler, T., 1996. *The Theory of Externalities, Public Goods, and Club Goods*, 2nd ed. Cambridge University Press, Cambridge. Fershtman, Chaim & Yoram Weiss. 1998. *Social rewards, externalities and stable preferences*. *Journal of Public Economics* 70 (1998) 53–73.

---

<sup>i</sup> Buckley, Neil, Mestelman, Stewart & Mohamed Shehata. 2003. Subsidizing Public Input. *Journal of Public Economics* 87 (2003) 819–846. Bowles, S & Sung-Ha Hwang (2008). *Social Preferences and Public Economics: Mechanism Design when Social Preferences Depend on Incentives*. *Journal of Public Economics* 92(2008) 1811-1820.

<sup>ii</sup> Davis, J.S., Quirnbach, H.C., Swenson, C.W., 1995. *Income Tax Subsidies and Research and Development Spending in a Competitive Economy: an Experimental Study*. *The Journal of the American Taxation Association* 17 (Supplement), 1–26.

<sup>iii</sup> Martinez, C., Javier. 2006. *Public Capital and Imperfect Competition*. *Journal of Public Economics* 90 (2006) 349–378.

<sup>iv</sup> Kneller, Bleaney, Michael F. & Norman Gemmell. 1999. *Fiscal Policy and Growth: Evidence from OECD Countries*. *Journal of Public Economics* 74 (1999) 171–190. Hamilton, F., Stephen, Sunding, L., Sunding & David Zilberman. 2003. *Public goods and the value of product quality regulations: the case of food safety*. *Journal of Public Economics* 87 (2003) 799–817.

<sup>v</sup> Cremer, Helmuth & Jean-Jacques Laffont. 2003. *Public goods with costly access*. *Journal of Public Economics* 87 (2003) 1985–201. Caplan, J., Arthur, Cornes C., Richard & Emilson C.D. Silva. 2000. *Pure public goods and income redistribution in a federation with decentralized leadership and imperfect labor mobility*. *Journal of Public Economics* 77 (2000) 265–284. Anderson, P., Simon, Goeree K., Jacob & Charles A. Holt. 1998. *A theoretical analysis of altruism and decision error in public goods games*. *Journal of Public Economics* 70 (1998) 297–323. Blomqvist, A & P-O. Johansson. 1997. *Economic efficiency and mixed public/private insurance*. *Journal of Public Economics* 66 (1997) 505–516.

<sup>vi</sup> Bucovetsky, S. 2005. *Public input competition*. *Journal of Public Economics* 89 (2005) 1763–1787. Dijk, V Frans, , Sonnemans Joep & Frans van Winden. 2002. *Social ties in a public good experiment*. *Journal of Public Economics* 85 (2002) 275–299. Goeree, K., Jacob, Holt, A., Charles & Susan K. Laury. 2002. *Private costs and public benefits: unraveling the effects of altruism and noisy behaviour*. *Journal of Public Economics* 83 (2002) 255–276.

<sup>vii</sup> Ellingsen, Tore. 1998. *Externalities vs internalities: a model of political integration*. *Journal of Public Economics* 68 (1998) 251–268. Cornes, R., Sandler, T., 1996. *The Theory of Externalities, Public Goods, and Club Goods*, 2nd ed. Cambridge University Press, Cambridge.

Fershtman, Chaim & Yoram Weiss. 1998. *Social rewards, externalities and stable preferences*. *Journal of Public Economics* 70 (1998) 53–73.

<sup>viii</sup> Ellingsen, Tore. 1998. *Externalities vs internalities: a model of political integration*. *Journal of Public Economics* 68 (1998) 251–268. Cornes, R., Sandler, T., 1996. *The Theory of Externalities, Public Goods, and Club Goods*, 2nd ed. Cambridge University Press, Cambridge. Fershtman, Chaim & Yoram Weiss. 1998. *Social rewards, externalities and stable preferences*. *Journal of Public Economics* 70 (1998) 53–73.